

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dina. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jom FEKON*. Vol.2. No.2. pp 1-15.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damaianti, Indriana. 2014. Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Bandung (Studi Survei pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Wydiatama. Bandung.
- Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. *Tren, Outlook, dan Tantangan Pajak 2017*
- Fathia, Nurul. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)". *JOM Fekon*. Vol.4. No.1. pp 670-685.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 5). Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2009. *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 Tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.
- Krestiwawan, Luky. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Ponorogo.
- Khalid, Faisal. 2010. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB. *Tesis*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Modul AKIP dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: LAN-RI.
- Lumenta, Agnestasia Laura. 2016. “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*. Vol.4. No.3. pp 135-146.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Masdayani, Ade. 2015. Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKPD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pendapat pribadi penulis oleh Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. *Tax Amnesty dan Momentum Reformasi*.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP). 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Diklat Pembentukan Auditor Ahli*. Edisi Kelima. 2007
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 202. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 80. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Siaran Pers. 2017. *Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang*. Jakarta.
- Silalahi, Sem Paulus. 2012. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kota Dumai)". *Jurnal Ekonomi*. Vol.20. No.3. pp 1-20.
- Soraya, Gita, Rika, dan Cherrya. 2014. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. eprints.mdp.ac.id/1475/1/Jurnal.pdf/ Diakses tanggal 5 November 2016.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Usman dan Lukman Pakaya. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolango. *Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Verasvera, Febrina Astria. 2016. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)". *Jurnal Manajemen*. Vol.15. No.2. pp 138-143.
- Wahdatul, Laura, Sri Rahayu, dan Vaya Juliana Dillak. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/116358/pengaruh-anggaran-berbasis-kinerja-dan-sistem-pelaporan-keuangan-terhadap-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-kabupaten-bandung-.html> Diakses tanggal 10 Januari 2017.
- <http://beritapagi.co.id/2016/05/18/sumsel-bertransformasi-jadi-provinsi-terbaik.html>. Diakses tanggal 14 Mei 2017.
- <http://detiksumsel.com.html>. Diakses tanggal 10 Maret 2017.
- <http://palembang.go.id.html>. Diakses tanggal 10 Maret 2017.
- <http://wartasumsel.co.id/2016/12/22/pencapaian-pad-11-jenis-pajak-palembang-berhasil-melebihi-target.html>. Diakses tanggal 14 Mei 2017.
- <http://news.metrotvnews.com/metro/1bV0YdXK-ahok-penyusunan-apbd-2016-harus-berbasis-kinerja.html>. Diakses tanggal 23 Juni 2017.
- <http://www.rmolsumsel.com/read/2017/06/05/73241/Pegawai-Dinas-Perumahan-Palembang-Terancam-Tak-Dapat-THR-.html>. Diakses tanggal 23 Juni 2017.
- <http://palembang.tribunnews.com/2017/06/05/asn-kota-palembang-harap-harap-cemas-beberapa-skpd-terancam-tidak-terima-tpp-juni?page=2>.html.
- <https://sumateradeadline.co.id/2017/03/20/minimalisir-kesalahan-laporan-daftar-hitam-diskominfo-bagikan-software-terbaru/>.html.
- <http://www.nuansakita.com/peristiwa/bkpsdm-terapkan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/>.html.